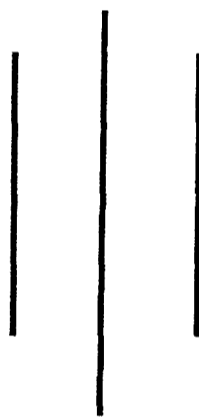




**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

KATA PENGANTAR

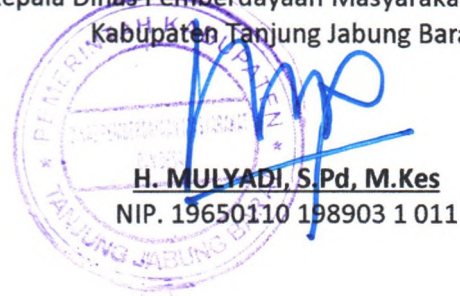
Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya telah dapat disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Melalui beberapa langkah-langkah penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari sasaran-sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat, seperti identifikasi dan pengumpulan sejumlah indikator kinerja, konsultasi, penilaian, pemilihan dan penetapan.

Ada 5 (lima) Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sudah ditetapkan, indikator tersebut merupakan tolak ukur dari keberhasilan kinerja dinas, dengan ditopang program-program dan kegiatan-kegiatan pilihan yang diharapkan dapat berhasil mencapai target kinerja yang ditentukan.

Kuala Tungkal,

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



H. MULYADI, S.Pd, M.Kes
NIP. 19650110 198903 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Tujuan	1
C. Landasan Hukum	1
BAB II PENGERTIAN INDIKATOR UTAMA	3
A. Pengertian Indikator Kinerja Utama	3
B. Langkah-langkah penetapan IKU	3
BAB III GAMBARAN UMUM DPMD KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	4
A. Gambaran Umum DPMD	4
B. Visi dan Misi DPMD	4
BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	6
BAB V PENUTUP	7

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat Kementerian Negara/Departemen/LPND/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya menggunakan indikator hasil (Outcome). Pada unit organisasi setingkat eselon I menggunakan indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja dibawahnya. Pada unit organisasi setingkat eselon II/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (output).

Berdasarkan hal diatas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang merupakan salah satu organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perlu menyusun Indikator Kinerja Utama atau Key Performance Indicators sehingga akan diperoleh informasi ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang akan dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

B. Tujuan

Tujuan dari ditetapkannya Indikator Kinerja Utama bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung jabung Barat adalah;

1. Untuk dijadikan pedoman dalam perencanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Dinas.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari kinerja Dinas dalam mencapai sasaran strategis.

C. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut;

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

D. Sistematika

Sistematika penyusunan IKU DPMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini adalah sebagai berikut;

BAB I Pendahuluan

Berisi latar belakang perlunya penetapan indikator kinerja utama, maksud dan tujuan penentuan indikator kinerja utama serta landasan hukum.

BAB II Pengertian Indikator Kinerja

Berisi definisi serta syarat dan kriteria indikator kinerja utama

BAB III Gambaran Umum

Berisi gambaran umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat, meliputi visi dan misi, tugas pokok dan fungsi serta arah kebijakan.

BAB IV Penetapan Indikator Kinerja Utama

BAB V Penutup

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. Pengertian Indikator Kinerja Utama

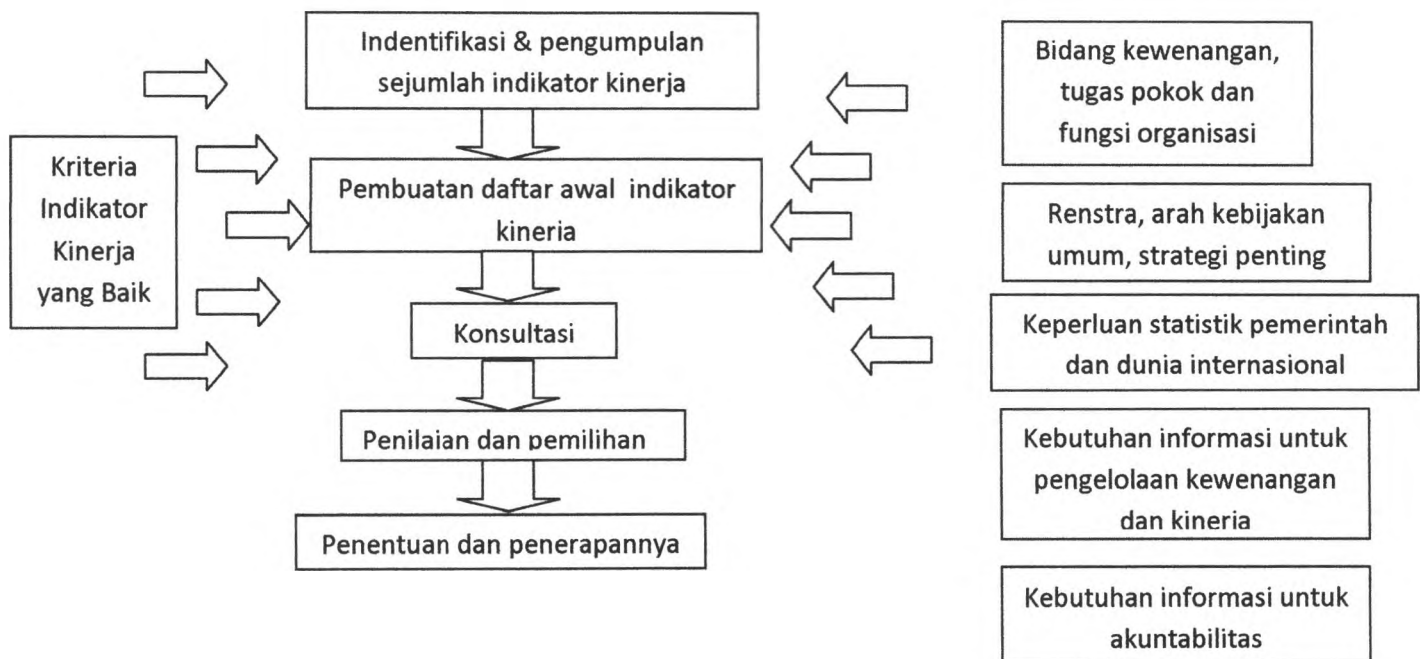
Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian strategis.

B. Langkah-langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama

Dalam menetapkan indikator kinerja utama diperlukan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, transparansi guna menghasilkan kinerja yang handal. IKU pada unit organisasi setingkat eselon II/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (Output).

Dengan memperhatikan persyaratan dan kriteria indikator kinerja, maka langkah-langkah yang umum dalam penetapan IKU pemerintah daerah dapat dijelaskan melalui gambar berikut;



BAB III
GAMBARAN UMUM
DPMD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

A. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 57 tahun 2016, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas ini dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

B. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah "Terwujudnya Masyarakat dan Desa yang Mandiri"

Adapun yang menjadi Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah;

- a. Mewujudkan kapasitas aparatur pemerintahan desa yang berkualitas
- b. Mewujudkan Keberdayaan Kelembagaan Sosial dan Usaha Ekonomi serta Peran Aktif Masyarakat dalam menggali potensi Ekonomi Perdesaan dan kawasan perdesaan.
- c. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara profesional, transparan dan akuntabel.
- d. Mewujudkan ketahanan masyarakat, nilai-nilai kegotongroyongan pendayagunaan teknologi tepat guna, sosial budaya dan adat istiadat.
- e. Mewujudkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pemenuhan layanan sosial dasar.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendukung Visi Misi ke-1 berbunyi; "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Kawasan Ekonomi yang Berkualitas, dan Misi Ke- 4 yang berbunyi; "Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik."

Dalam upaya mewujudkan misi ke-1 (satu) dan ke-4 tersebut, maka program pembangunan khusus urusan wajib Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang akan dilaksanakan adalah;

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
5. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

BAB IV
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam menentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017, dilaksanakan rapat dan musyawarah bersama Tim penyusunan Renstra DPMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017.

Tahapan yang dilaksanakan dalam menentukan Indikator Kinerja Utama (IKU);

1. Klarifikasi apa yang menjadi Kinerja Utama
2. Menyusun daftar awal IKU yang mungkin dapat digunakan
3. Melakukan penilaian setiap IKU yang terdapat dalam daftar awal Indikator Kinerja
4. Memilih IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel berikut;

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Bidang Penanggung jawab
1	Meningkatnya Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif	70%	Bidang PPM
2	Meningkatnya Jumlah Desa Swasembada	15 Desa Swasembada	Bidang PKP, PPM, Pemdes
3	Meningkatnya lembaga ekonomi pedesaan yang mandiri dan unggul	114 BUM Desa	Bidang PPM dan PKP
4	Jumlah BUM Desa Bersama yang terbentuk di setiap kecamatan	13 BUM Desa Bersama	Bidang PPM dan PKP
5	Jumlah desa dengan perencanaan, penganggaran, perbedaharaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang baik	114 Desa	Bidang Pemdes

IKU | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BAB V
PENUTUP

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat diharapkan mampu menjadi pendorong kinerja Dinas menjadi lebih baik dalam mencapai sasaran strategis.

Diperlukan pemikiran dan kerja keras dari segenap pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mencapai sasaran strategis, dimana tujuan akhir dari semuanya adalah dalam rangka untuk terwujudnya Masyarakat dan Desa yang Mandiri.



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KATA PENGANTAR

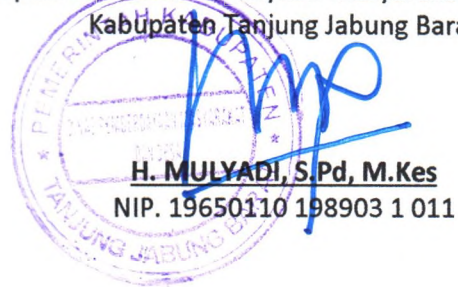
Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya telah dapat disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Melalui beberapa langkah-langkah penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari sasaran-sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat, seperti identifikasi dan pengumpulan sejumlah indikator kinerja, konsultasi, penilaian, pemilihan dan penetapan.

Ada 5 (lima) Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sudah ditetapkan, indikator tersebut merupakan tolak ukur dari keberhasilan kinerja dinas, dengan ditopang program-program dan kegiatan-kegiatan pilihan yang diharapkan dapat berhasil mencapai target kinerja yang ditentukan.

Kuala Tungkal,

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



H. MULYADI, S.Pd, M.Kes
NIP. 19650110 198903 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Tujuan	1
C. Landasan Hukum	1
BAB II PENGERTIAN INDIKATOR UTAMA	3
A. Pengertian Indikator Kinerja Utama	3
B. Langkah-langkah penetapan IKU	3
BAB III GAMBARAN UMUM DPMD KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	4
A. Gambaran Umum DPMD	4
B. Visi dan Misi DPMD	4
BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	6
BAB V PENUTUP	7

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat Kementerian Negara/Departemen/LPND/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya menggunakan indikator hasil (Outcome). Pada unit organisasi setingkat eselon I menggunakan indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja dibawahnya. Pada unit organisasi setingkat eselon II/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (output).

Berdasarkan hal diatas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang merupakan salah satu organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perlu menyusun Indikator Kinerja Utama atau Key Performance Indicators sehingga akan diperoleh informasi ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang akan dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

B. Tujuan

Tujuan dari ditetapkannya Indikator Kinerja Utama bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung jabung Barat adalah;

1. Untuk dijadikan pedoman dalam perencanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Dinas.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari kinerja Dinas dalam mencapai sasaran strategis.

C. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut;

IKU	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
-----	--

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

D. Sistematika

Sistematika penyusunan IKU DPMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini adalah sebagai berikut;

BAB I Pendahuluan

Berisi latar belakang perlunya penetapan indikator kinerja utama, maksud dan tujuan penentuan indikator kinerja utama serta landasan hukum.

BAB II Pengertian Indikator Kinerja

Berisi definisi serta syarat dan kriteria indikator kinerja utama

BAB III Gambaran Umum

Berisi gambaran umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat, meliputi visi dan misi, tugas pokok dan fungsi serta arah kebijakan.

BAB IV Penetapan Indikator Kinerja Utama

BAB V Penutup

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. Pengertian Indikator Kinerja Utama

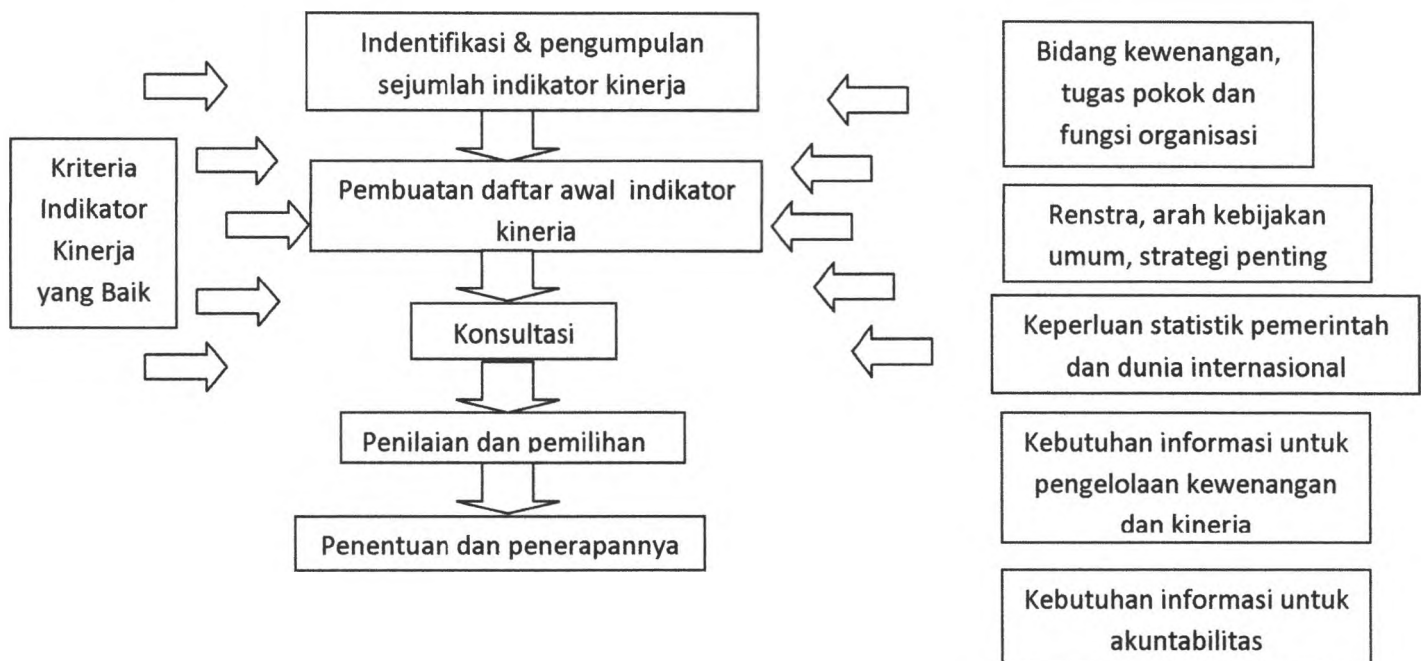
Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian strategis.

B. Langkah-langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama

Dalam menetapkan indikator kinerja utama diperlukan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, transparansi guna menghasilkan kinerja yang handal. IKU pada unit organisasi setingkat eselon II/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (Output).

Dengan memperhatikan persyaratan dan kriteria indikator kinerja, maka langkah-langkah yang umum dalam penetapan IKU pemerintah daerah dapat dijelaskan melalui gambar berikut;



BAB III

GAMBARAN UMUM

DPMD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

A. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 57 tahun 2016, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas ini dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

B. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah "Terwujudnya Masyarakat dan Desa yang Mandiri"

Adapun yang menjadi Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah;

- a. Mewujudkan kapasitas aparatur pemerintahan desa yang berkualitas
- b. Mewujudkan Keberdayaan Kelembagaan Sosial dan Usaha Ekonomi serta Peran Aktif Masyarakat dalam menggali potensi Ekonomi Perdesaan dan kawasan perdesaan.
- c. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara profesional, transparan dan akuntabel.
- d. Mewujudkan ketahanan masyarakat, nilai-nilai kegotongroyongan pendayagunaan teknologi tepat guna, sosial budaya dan adat istiadat.
- e. Mewujudkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pemenuhan layanan sosial dasar.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendukung Visi Misi ke-1 berbunyi;

"Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Kawasan Ekonomi yang Berkualitas, dan Misi Ke- 4 yang berbunyi; "Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik."

Dalam upaya mewujudkan misi ke-1 (satu) dan ke-4 tersebut, maka program pembangunan khusus urusan wajib Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang akan dilaksanakan adalah;

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
5. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

BAB IV
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam menentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017, dilaksanakan rapat dan musyawarah bersama Tim penyusunan Renstra DPMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017.

Tahapan yang dilaksanakan dalam menentukan Indikator Kinerja Utama (IKU);

1. Klarifikasi apa yang menjadi Kinerja Utama
2. Menyusun daftar awal IKU yang mungkin dapat digunakan
3. Melakukan penilaian setiap IKU yang terdapat dalam daftar awal Indikator Kinerja
4. Memilih IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel berikut;

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Bidang Penanggung jawab
1	Meningkatnya Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif	70%	Bidang PPM
2	Meningkatnya Jumlah Desa Swasembada	15 Desa Swasembada	Bidang PKP, PPM, Pemdes
3	Meningkatnya lembaga ekonomi pedesaan yang mandiri dan unggul	114 BUM Desa	Bidang PPM dan PKP
4	Jumlah BUM Desa Bersama yang terbentuk di setiap kecamatan	13 BUM Desa Bersama	Bidang PPM dan PKP
5	Jumlah desa dengan perencanaan, penganggaran, perbedaharaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang baik	114 Desa	Bidang Pemdes

BAB V
PENUTUP

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat diharapkan mampu menjadi pendorong kinerja Dinas menjadi lebih baik dalam mencapai sasaran strategis.

Diperlukan pemikiran dan kerja keras dari segenap pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mencapai sasaran strategis, dimana tujuan akhir dari semuanya adalah dalam rangka untuk terwujudnya Masyarakat dan Desa yang Mandiri.

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2018

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang baik	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang baik	Berjalannya pelayanan administrasi perkantoran dengan lancar	12 bulan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.498.973.603
					Penyediaan jasa surat menyurat	2.100.000
					Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	117.000.000
					Penyediaan jasa administrasi keuangan	130.920.000
					Penyediaan jasa kebersihan kantor	16.371.352
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	54.899.606
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	72.088.295
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.453.100
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.200.000
					Penyediaan makanan dan minuman rapat	11.280.000
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.061.061.250
					Penyediaan Iklan Layanan	15.600.000
Terwujudnya jumlah sarana dan prasarana aparatur yang layak guna	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana aparatur yang layak guna	Persentase kecukupan sarana dan prasarana layak guna	77%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		180.300.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
					Pengadaan peralatan gedung kantor	25.000.000
					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	39.000.000
					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	99.450.000
					Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	16.850.000
Terwujudnya disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	82%	Program peningkatan Disiplin Aparatur		16.800.000
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	16.800.000
Terwujudnya pengetahuan dan kinerja aparatur	Meningkatnya pengetahuan dan kinerja aparatur	Persentase ASN yang sesuai kompetensi	64%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		25.000.000
					Pengembangan SDM	25.000.000
Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	Nilai evaluasi SAKIP	B	Program pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		33.970.500
					Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	33.970.500
Terwujudnya penguatan ketahanan masyarakat, nilai-nilai kegotongroyongan, pendayagunaan teknologi tepat guna, sosial budaya dan adat istiadat	Menguatnya ketahanan masyarakat, nilai-nilai kegotongroyongan, pendayagunaan teknologi tepat guna, sosial budaya dan adat istiadat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	55%	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		2.636.964.436
					Pembinaan, pemasyarakatan dan penerapan Teknologi tepat Guna	63.277.420

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												KET	
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR 1			TR 2			TR 3			TR 4				
		1	2	3								1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10												11	
Meningkatnya pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara profesional, transparan dan	Jumlah BUM desa bersama yang terbentuk di setiap kecamatan					Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		2 BUM desa bersama																	
						Pembinaan, monitoring serta pendampingan Dana Desa		114 desa	Melaksanakan pembinaan dan monitoring dalam penggunaan dana desa	105.942.000	Kabid PPM														
						Sosialisasi dan Monitoring BUM Desa bersama		13 BUM desa bersama	Melaksanakan sosialisasi dan monitoring BUM desa bersama	112.925.000	Kabid PKP														
Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa	Jumlah desa dengan perencanaan, penganggaran, perbendaharaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang baik					Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa		114 desa																	
						Pembentukan Tim Pengelola Alokasi Dana Desa	Penyaluran Alokasi dana desa		Pembentukan Tim ADD dan terlaksananya penyaluran alokasi dana desa yang tepat	118.874.000	Kabid Pemdes														
						Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kepala Desa		Melaksanakan Rapat koordinas dengan Kepala desa	98.050.000	Kabid Pemdes														
						Penyusunan peraturan tata pemerintahan desa	Dokumen tata pemerintahan desa		Melaksanakan penyusunan peraturan tata pemerintahan desa	118.874.000	Kabid Pemdes														

Kuala Tungkal,

2018

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

H. MULYADI, S.Pd., M.Kes

Pembina HK

NIP. 196501101980031011

